BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2021 menjadi dasar masalah penelitian ini dilakukan, karena setelah rumusan masalah yang dibangun melalui temuan data awal kemudian bersambung pada pencarian data secara mendalam melalui metode wawancara dan dukungan data dokumentasi, serta dilakukan analisis data berdasarkan konsepsi pemikiran Barbara Geddes yang menjadi pedoman selama penelitian berlangsung, maka peneliti menyimpulkan bahwa asumsi peneliti yang menitikberatkan persoalan mutasi jabatan ini dengan adanya indikasi kepentingan walikota selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi dapat terjawab.

Kepentingan walikota selaku PPK dalam struktur pemerintahan di Kota Padang menjadi bentuk politisasi birokrasi yang dilakukannya karena persoalan mutasi jabatan ini merupakan keputusan yang cacat prosedural, namun tetap diteruskan dan diterima oleh KASN, sehingga sangat besar muatan politisnya. Kemudian sejalan dengan pemikiran Barbara Geddes, bahwa kepentingan walikota sebagai pejabat politik yang memanfaatkan birokrasi untuk memenuhi tiga kepentingan utama yaitu, (1) Melanggengkan kekuasaan; (2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan (3) Mewujudkan efektifitas pemerintahan. Secara umum,

ketiga kepentingan utama tersebut memang dilakukan oleh walikota secara tidak langsung pada pelaksanaan mutasi jabatan di Kota Padang.

Berdasarkan tiga kepentingan utama walikota dalam melakukan mutasi jabatan, hanya dua indikator yang kemudian mendominasi kepentingan walikota secara pribadi. Pertama, kepentingan walikota tentu memperhitungkan agenda Pemilukada tahun 2024, sebagaimana maksud dan tujuan walikota melakukan mutasi jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama, menunjukkan bahwa walikota lebih mengedepankan faktor *like* dan *dislike*. Kedua, Menciptakan mesin politik yang loyal menjadi kebutuhan awal walikota agar kemudian mampu memenuhi kepentingan lainnya seperti mempertahankan kekuasaannya, karena sebagai pejabat politik yang berkuasa di pemerintahan saat ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya, tidak hanya uang namun sumber daya manusia terkhususnya di kalangan birokrasi.

Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh walikota selaku PPK dan kemudian mendapat surat teguran dari pihak KASN untuk mengembalikan pejabat yang dimutasi dan melakukan *job fit* terlebih dahulu, namun setelah dilakukannya komunikasi antara kedua pihak, akhirnya keputusan walikota terhadap pelaksanaan mutasi jabatan tetap dilakukan. Hal tersebut menunjukkan salah satu bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan oleh walikota. Kemudian pada indikator mewujudkan efektifitas pemerintahan, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan ini belum dapat terjawab secara komprehensif berdasarkan temuan data di lapangan maupun dukungan data sekunder dan untuk lebih lengkapnya akan peneliti sarankan bagi penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah tuliskan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kajian politisasi birokrasi yang peneliti hadirkan berdasarkan pemikiran Barbara Geddes, kiranya mampu memberikan masukan berharga bagi perkembangan birokrasi yang berkelanjutan, khususnya bagi pemerintah daerah, dengan mengetahui bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan kepala daerah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, ASN, dan pemangku kebijakan untuk dapat mengantisipasi kejadian yang sama tidak terjadi lagi.
2. Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebetulnya perlu dievaluasi kembali atau lebih tepatnya kewenangan yang dimiliki oleh KASN perlu dipertimbangkan lagi. Karena bagaimanapun peran KASN dalam mewujudkan tatanan birokrasi khususnya pada pemerintah daerah harus benar-benar berjalan sesuai dengan prosedur hukum tanpa intervensi politik. Bagi aturan undang-undang mengenai tugas, fungsi dan kewenangan KASN sebetulnya sangatlah lemah terhadap kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), sehingga KASN seringkali tidak mampu bertindak dengan tegas.
3. Selain kajian politisasi birokrasi yang digunakan dalam mengidentifikasi persoalan mutasi jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2021, tentu dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi masalah tersebut dari perspektif politik kebijakan, karena

hal ini berangkat dari permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran mekanisme pelaksanaan mutasi jabatan. Peneliti selanjutnya juga dapat berangkat dari perspektif *good governance* untuk melihat efektifitas pemerintahan sebagai satu indikator dari pemikiran Barbara Geddes yang belum dapat peneliti jawab secara detail.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA